

## **PENGAWASAN BADAN PERMUSYARATAN KAMPUNG (BPK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG DEMPAR DI KECAMATAN NYUATAN KABUPATEN KUTAI BARAT**

**Azellius G.<sup>1</sup>, Erwin Resmawan<sup>2</sup>, Melati Dama<sup>3</sup>**

### **Abstrak**

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengawasan Badan Permusyaratan Kampung (BPK) melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Dempar Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan fokus penelitian meliputi: Monitoring yaitu perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kampung, pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan Evaluasi yaitu Kinerja Kepala Kampung (Petinggi) selama 1 (satu) tahun anggaran. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi di lapangan, hasil wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan data model interaktif yang dikembangkan oleh Milles, Huberman dan Saldana (2014), melalui pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan Badan Permusyaratan Kampung (BPK) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Dempar Di Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur sudah terlaksana cukup optimal. Pengawasan dalam perencanaan kegiatan Pemerintah Kampung bersama dengan masyarakat melalui musyawarah berdasarkan pedoman yang ditetapkan, dalam perencanaan kegiatan pemerintahan kampung dilakukan bersama-sama oleh BPK, Petinggi, dengan melibatkan masyarakat melalui musyawarah. Untuk pelaksanaannya monitoring oleh BPK dan masyarakat serta evaluasi yang dilakukan oleh BPK dan pengawasan laporan pertanggung jawaban di laporkan kepada Camat. Faktor pendukung dalam pengawasan BPK dalam pelaksanaan pembangunan di kampung dempar adalah keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kampung dan kepercayaan pemerintah kampung terhadap masyarakat yang diajak untuk kerja sama melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah kampung.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [azelliusazel@gmail.com](mailto:azelliusazel@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

*Sedangkan faktor penghambat pengawasan BPK dalam pelaksanaan pembangunan di kampung dempar adalah: adanya sebagian masyarakat tidak ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dan gotong royong di Kampung Dempar dan keterlambatan pencairan dana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dalam melakukan kegiatannya.*

**Kata Kunci:** *Pengawasan, pembangunan, pemerintahan, kampung.*

## **Pendahuluan**

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, sehingga berbagai ahli manajemen dalam memberikan pendapatnya tentang fungsi manajemen selalu menempatkan unsur pengawasan sebagai fungsi yang penting. Kasus-kasus yang terjadi dalam banyak organisasi adalah tidak diselesaikannya suatu penugasan, tidak ditepatinya waktu dalam penyelesaian suatu anggaran yang berlebihan dan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang dari rencana. Begitu pentingnya pengawasan dalam suatu organisasi sehingga keberhasilan atau kinerja suatu organisasi menjadi ukuran, sampai dimana pelaksanaan pengawasan terhadap organisasi tersebut. Bahkan dalam praktek manajemen modern pengawasan tidak dapat lagi dipisahkan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya.

Kampung Dempar merupakan Ibu kota Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan hasil pemekaran Kecamatan Damai yang dilandasi dengan Perda No 13 Tahun 2003 tentang pemekaran Kecamatan. Kampung Dempar memiliki jumlah penduduk 664 jiwa dan 210 kk. Oleh karena itu perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melaksanakan program pembangunan di daerah masing-masing sesuai dengan visi, misi pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Pembangunan di kampung Dempar yang merupakan pusat Ibu kota Kecamatan Nyuatan kurang lebih selama 10 tahun terbentuknya, terasa sangat lambat karena dalam Pelayanan Pemerintahan kampung terhadap masyarakat belum maksimal karena sarana dan prasarana seperti komputer, alat tulis kantor (ATK) sangat terbatas, Administrasi desa masih kurang baik, Pemerinah kampung masih kesulitan melayani masyarakat secara administrasi dan menyampaikan laporan rutin karena minimnya fasilitas seperti komputer dan ATK dan pendidikan pegawai yang masih kurang. Walaupun secara keunggulan komperatif sangat kaya baik perkebunan Karet, Roton, Pertanian, serta hasil dari pertanian. Oleh karena itu melalui rencana pembangunan jangka menengah kampung ( RPJM-Kam ) dan rencana pembangunan ini, kiranya pemerintah Kabupaten Kutai Barat dapat mengalokasikan anggaran pembangunan sarana dan prasarana yang lebih menunjang dan lebih layak.

Kondisi sosial budaya masyarakat ditunjukkan masih rendahnya kualitas dari sebagian SDM masyarakat di kampung Dempar, serta cenderung masih kuatnya

budaya paternalistik. Meskipun demikian pola budaya seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilisasi masa. Di samping itu masyarakat kampung Dempar yang cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis, dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya tranparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Munculnya masalah kemiskinan, ketenaga kerjaan dan perubahan menyangkut pendapatan, status pemanfaatan lahan pada fasilitas umum menunjukkan masih adanya kelemahan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada saat ini. Kondisi ini akan dapat menjadi pemicu timbulnya benih kecemburuan sosial dan sengketa berkepanjangan, jika tidak diselesaikan sejak dini.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan kampung, Anggaran dan pendapatan belanja kampung tahun 2017 pemerintah kampung Dempar Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat, menetapkan peraturan kampung Dempar tentang laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kampung Dempar tahun 2017, anggaran pendapatan dan belanja kampung perubahan Dempar tahun anggaran 2017, Pendapatan kampung Rp. 1.439.627.000; bahwa sesuai rencana kerja pemerintah desa (RKP kampung) tahun anggaran 2017, maka perlu menyusun anggaran pendapatan dan belanja kampung Dempar Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat Tahun anggaran 2017, Pengawasan badan permusyawaratan desa dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di kampung Dempar dan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kampung tahun anggaran 2017 sebagai berikut :

1. Bidang penyalenggaraan pemerintah kampung
2. Bidang pembangunan
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan
4. Bidang pemberdayaan masyarakat

Pembangunan non fisik secara administrasi terlaksana walaupun di dalam pemerintah kampung masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelayanan pemerintahan kampung terhadap masyarakat belum berjalan maksimal dan administrasi pemerintah desa masih kurang baik terhadap warga masyarakat pembangunan fisik yang terlaksana ialah pembangunan sarana air bersih dan kegiatan pembangunan jalan desa dengan rincian anggaran Rp. 736.891.000,- program dan pembangunan sudah terlaksana dengan serta dipergunakan sesuai dengan rab yang ada oleh pemerintah kampung Dempar Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat.

Berdasarkan observasi penulis sejauh ini pengawasan Badan Permasyarakatan Kampung (BPK) di kampung Dempar Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat dalam pelaksanaan pengawasan terhadap program kerja yang berkaitan dengan pembangunan fisik dan non fisik oleh Kepala desa (pemerintah kampung), pelaksanaan pengawasan BPK juga dirasakan belum optimal dalam menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Terlihat dari beberapa hal yang menjadi masalah dalam pengawasan Badan Permusyaratan Kampung, Kondisi ini dibuktikan dengan, tidak terlihatnya kerja sama antara petinggi dan Badan Permusyaratan Kampung.

Sehingga tidak terjadinya hubungan, komunikasi, bertukar pikiran yang terjadi antara anggota BPK dan Kepala Kampung. terlihat dari beberapa permasalahan baik pembangunan fisik dan non fisik seperti; Administrasi desa masih kurang baik, Pemerintahan kampung masih kesulitan melayani masyarakat secara administrasi, sumber daya manusia masih kurang (Pendidikan Pengawai) serta pembangunan fisik serana dan prasana seperti perbaikan pembangunan gedung sekolah (pendidikan) yang masih mengandalkan proyek bukan dari anggaran dana desa. Maka penulis tertarik melihat bagaimana proses pengawasan yang dilakukan Badan Permusyaratan Kampung terhadap Petinggi (pemerintah kampung) dan pengawasan kinerja Kepala kampung yang dilakukan Badan Permusyaratan Kampung melalui pelaksanaan pengawasan BPK terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian secara mendalam dengan mengambil judul “Pengawasan Badan Permusyaratan Kampung (BPK) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung Dempar Kabupaten Kutai Barat”.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Pengawasan***

Menurut Sujamto (2003:17) mengatakan pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Terdiri dari dua bagian yaitu pertama menggambarkan wujud dari kegiatan pengawasan, kedua menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pengawasan itu.

Menurut Makmur (2011:175) pengertian pengawasan kalau kita melihat dari asal kata “awas” maknanya mengajak agar seseorang atau beberapa orang dalam melakukan sesuatu kegiatan penuh dengan kehati-hatian, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan. Kemudian diberikan awalan “pe” atau sisipan “ng” dengan akhiran “an”, maka terciptalah kata pengawasan dimana pengembangannya dalam pemikiran manusia dengan merumuskan yang berbeda-beda antara pemikiran atau pemahaman manusia yang satu dengan pemahaman manusia yang lainnya. Perbedaan pola pemikiran dalam memberikan rumusan tentang pengawasan tentunya sangat banyak faktor sebagai penyebabnya antara lain sasaran kegiatan yang dilakukan, tingkat kesulitan tentang pekerjaan, manusia yang dihadapinya, dan perkembangan lingkungan sosial dan fisik yang dihadapinya.

### ***Indikator Pengawasan***

Menurut Arifin Abdul Rahman (2001:23), salah satu indikator keberhasilan suatu organisasi pemerintah dalam mencapai tujuannya banyak ditentukan oleh keberhasilan pengawasan. Jika pengawasan berjalan dengan baik maka pengawasan merupakan unsur paling pokok dalam menentukan keberhasilan suatu program. Keberhasilan pengawasan sendiri dapat dilihat dari berbagai macam indikator sebagai berikut:

1. Indikator meningkatkan disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas, antara lain;
  - a. Rencana yang disusun dapat menggambarkan adanya sasaran yang jelas dan dapat diukur, terlihat kaitan antara rencana dengan program dan anggaran.
  - b. Tugas dapat selesai sesuai dengan rencana, baik dilihat dari aspek fisik maupun biaya.
2. Indikator berkurangnya penyalahgunaan wewenang yaitu berkurangnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah.
3. Indikator berkurangnya kebocoran, pemborosan, dan pugutan antara lain:
  - a. Kualitas dan kuantitas kasus-kasus penyimpangan, penyelewengan, kebocoran, pemborosan dapat dikurangi sebagaimana laporan pengawasan fungsional dan laporan pengawasan lainnya.
  - b. Berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

### ***Kinerja***

Menurut Achmad Amins (2012:41) kinerja merupakan istilah dalam manajemen yang didefinisikan melalui perspektif atau sudut pandang yang berbeda oleh para ahli. Konseptualisasi tersebut sangat bergantung dari implemmentasi di Institusi apa pengertian tersebut ditempatkan. Kinerja yang di terjemahkan dari kosa-kata bahasa inggeris *performance*, juga berarti prestasi kerja, pencapaian kerja, hasil kerja, unjuk kerja, atau penampilan kerja.

Sedangkan Harsey dan Blanchard (dalam Achmad Amins, 2012:42) menyatakan kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan, seorang harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya.

### ***Pemerintah Desa***

Menurut Hanif Nurcholis (2011:73) Pemerintah Desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas;

1. Unsur pemimpin, yaitu kepala desa;
2. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas;
  - a. Sekretaris desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekretaris desa;
  - b. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknik di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;
  - c. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

### ***Badan Permusyaratan Desa (BPD)***

Menurut Waristiano dan Tahir (2007:24) Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada selama ini berubah nama menjadi Badan Permusyaratan Desa. Badan Permusyaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya BPD sebagai Badan Permusyaratan yang berasal dari masyarakat desa, di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus dapat menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi *representasi*.

### ***Pembangunan***

Menurut Makmur (2011:117) sejalan dengan perkembangan dalam perjalanan kehidupan manusia terutama dalam sebuah negara dan bangsa, kita dapat beranggapan bahwa tidak ada suatu perubahan manusia yang tidak menciptakan hukum alam secara sebab akibat. Yang dimaksudkan disini adalah semua perubahan atau tindakan manusia yang selalu ada penyebabnya dan apabila tindakan atau perubahan itu telah dilakukan dapat dipastikan bahwa mengandung dua jenis akibat; yang pertama apakah dapat memberikan manfaat dalam kehidupan sosial, dan yang kedua terjadikah kerugian yang mendasar dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Konsekuensi perubahan manusia seharusnya dapat dipikirkan sebelum tindakan atau perubahan dilakukan sehingga dapat menciptakan hasil yang maksimal dengan mencegah kegagalan seminimalnya. Oleh sebab itu sebelum melakukan suatu tindakan atau pekerjaan perlu dilakukan proses perencanaan secara teratur dan berkesinambungan, karena apabila setiap tindakan atau pekerjaan tidak dilakukan perencanaan secara matang dan pelaksanaannya juga tidak dilakukan secara berkesinambungan pasti tidak dapat memberikan hasil yang maksimal.

### ***Pembangunan Desa***

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak ikat otonomi

daerah adalah upaya memberdaya daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Dalam perkembangan otonomi daerah, pemerintah pusat semakin memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintahan desa. Pada gilirannya, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, mewujudkan peran keaktifan masyarakat untuk turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagian sesama warga desa. Hal ini lebih ditegaskan dalam pengaturan mengenai desa, yaitu dengan ditetapkannya PP No. 72 tahun 2005. Sementara itu, prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengatur mengenai desa mencakup keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

### **Metode Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, karena pada dasarnya penelitian ini menggambarkan dan mengetahui permasalahan yang diteliti dalam permasalahan tersebut, yaitu mengenai Pengawasan Badan Permusyaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Kampung Dempar Kabupaten Kutai Barat.

Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. Pengawasan Badan Permusyaratan Kampung (BPK) dalam pelaksanaan pembangunan di kampung Dempar Kabupaten Kutai Barat, melalui :
  - 1.1.1 Perencanaan kegiatan pemerintah Kampung
  - 1.1.2 Pelaksanaan kegiatan
  - 1.1.3 Pelaporan penyelenggaraan pemerintah Kampung
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pembangunan di kampung Dempar.

### **Hasil Penelitian**

#### ***Pengawasan Badan Permusyaratan Kampung (BPK) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Dempar di Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat***

##### *Perencanaan Kegiatan Pemerintah Kampung*

Kepala Kampung Dempar mengatakan bahwa dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kampung dalam menjangkau aspirasi masyarakat baik dalam bentuk ide, gagasan, serta proses pengelolaan alokasi dana desa dijalankan sesuai dengan musyawarah bersama dalam setiap proses pelaksanaan dan perencanaan kegiatan Pemerintahan Kampung melibatkan BPK dan Masyarakat maupun tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kampung Dempar. Bahwa setiap kegiatan Pemerintahan Kampung selalu melibatkan BPK dan

Masyarakat dalam setiap kegiatan perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung Dempar. Hasil wawancara peneliti dengan ketua Badan Permusyaratan Kampung (BPK) Bapak Burhan. Dapat dilihat pada foto halaman lampiran mengenai kegiatan Pemerintahan Kampung dalam perencanaan dan pelaksanaan di Kampung Dempar.

Dalam kegiatan Pemerintahan Kampung, BPK ikut serta termasuk dalam membuat peraturan kampung. Dari wawancara diatas BPK juga menjelaskan peraturan Kampung dibuat dengan melihat kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat, selain Kepala Kampung (petinggi), BPK juga berhak membuat atau mengusulkan rancangan peraturan Kampung yang nantinya dibahas bersama Kepala Kampung Dempar dan masyarakat, dalam wawancara diatas BPK juga menjaga hubungan baik dengan Kepala Kampung (petinggi) dalam meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kampung Dempar. Dapat dilihat pada foto halaman lampiran mengenai kegiatan pemerintahan Kampung.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara ketua RT menjelaskan bahwa setiap pelaksanaan setiap pekerjaan masyarakat ikut ambil bagian dalam mengawasi setiap pekerjaan Pemerintahan Kampung Dempar selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan *informant* yang lain tokoh masyarakat Kampung Dempar Bapak Ngadap (Kepala Adat) di Kampung Dempar dapat dilihat di foto halaman lampiran mengenai kegiatan Pemerintahan Kampung Dempar dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan setiap kegiatan Pemerintahan Kampung Dempar

Kegiatan Pemerintahan Kampung dalam perencanaan dan pelaksanaan yang melalui proses pengelolaan alokasi dana kampung, pengawasan melalui BPK, masyarakat, tokoh masyarakat melalui wawancara diatas memang sudah terlaksana dengan baik dalam setiap proses pekerjaan, perencanaan, pelaksanaan menjadi sangat penting dalam setiap hubungan antara Kepala Kampung (petinggi) dan masyarakat dalam menjalankan setiap kegiatan Pemerintahan Kampung dengan baik.

#### *Pelaksanaan Kegiatan*

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan *key informant* maupun *informants* dapat di lihat mengenai evaluasi kerja Kepala dan pelaksanaan tugas Kepala Kampung yang dilakukan dalam pelaksanaan 1 (satu) tahun anggaran, bahwa evaluasi dilakukan oleh pengurus Badan Permusyaratan Kampung (BPK) yang ada di Kampung Dempar bersama dengan pemerintah kampung hal ini dilakukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan setiap pekerjaan dalam pelaksanaan pembangunan. Adanya UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, saat ini BPK memiliki hak mengawasi kinerja Petinggi Kampung. BPK melakukan pengawasan pada sistem pengelolaan administrasi di kantor Petinggi Kampung Dempar yang ada di kampung Dempar dinilai cukup baik oleh BPK. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyaratan Kampung di Kampung



Dempar lebih kepada evaluasi kerja, anggaran desa, pembangunan dan pelayanan yang diberikan Pemerintah Kampung kepada masyarakat seperti pembuatan surat keterangan tidak mampu serta hal-hal lain yang sudah menjadi kewajiban Pemerintah Kampung. Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam menjalankan fungsinya yaitu dengan mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pelaksana Peraturan Kampung, dalam hal ini yaitu Pemerintah Kampung. Proses pengawasan terhadap pemerintah Kampung yang dilakukan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) tidak lepas dari peran serta masyarakat sehingga setiap kegiatan pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), masyarakat mengetahuinya, sebuah mekanisme kontrol diperlukan agar pemerintah yang demokrasi dapat terselenggara dengan baik dan terbuka. BPK dalam hal ini pada penyesuaian proses pengawasan yang dilakukan BPK dengan kehendak dan harapan masyarakat.

#### *Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung*

Ketua BPK memberikan pernyataan bahwa kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kampung Dempar dilakukan dengan cara pelaporan oleh Kepala Kampung Dempar yang dilakukan melalui tahap-tahap yang kemudian dilihat dan diperiksa oleh BPK melalui laporan pertanggungjawaban pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana yang diinginkan masyarakat sesuai dengan musyawarah bersama yang dilakukan.

Berdasarkan pernyataan Ketua RT 03 Kampung Dempar dapat diketahui bahwa setiap proses pelaksanaan pembangunan masyarakat selalu terlibat ikut serta dalam pelaksanaan infrastruktur jalan kampung, membuang tempat sampah dalam partisipasi pembangunan yang ada masyarakat juga dibayar harian dalam proses pembangunan yang ada hanya saja bentuk laporan tertulis yang tidak ada.

Penetapan setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Kampung Dempar memang terlaksana sesuai dengan proses yang ada dan diatur oleh Pemerintahan Kampung Dempar dengan baik dalam penetapan penyusunan program yang dilakukan Petinggi Kampung Dempar dan Pemerintah kampung agar pelaksanaan program tersebut dapat berjalan dengan baik harus dilaksanakannya sifat keterbukaan dari pemerintahan di Kampung Dempar dalam setiap proses pelaksanaan pembangunan yang ada oleh karena itu pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam penyelenggaraan pemerintahan harus mendapat dukungan dari warga secara keseluruhan dan pemerintah kampung agar pelaksanaan program tersebut dapat berjalan dengan baik.

#### ***Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung Dempar Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat***

Dalam setiap kegiatan tentunya memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat, seperti halnya dengan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

Faktor pendukung dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung Dempar sedangkan faktor penghambat merupakan sesuatu hal yang membutuhkan solusi agar penyelenggaraan Pemerintahan Kampung tetap bisa dilakukan secara maksimal.

1. Faktor pendukung
  - a) Mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Kampung dalam pembangunan.
  - b) Adanya kepercayaan Pememerintah Kampung Terhadap masyarakat untuk bekerjasama dalam melakukan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
2. Faktor Penghambat
  - a) Kurangnya partisipasi masyarakat Kampung Dempar
  - b) Keterlambatan pencairan dana kegiatan Pemerintahan Kampung dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Dempar.

## **Kesimpulan dan Saran**

### ***Kesimpulan***

1. Dalam perencanaan kegiatan Pemerintahan Kampung telah dilakukan oleh Petinggi Kampung secara rutin bersama dengan BPK dan masyarakat yang dimulai dari sejak awal tahun 2017, penetapan prioritas kegiatan dilakukan melalui proses musyawarah ditingkat Kampung dengan tujuan mengambil keputusan bersama masyarakat mengenai program yang akan diutamakan pelaksanaannya di Kampung Dempar. Akan tetapi dalam proses penetapan prioritas kegiatan Pemerintah Kampung pengurus Kampung Dempar belum bisa mengakomodir seluruh warga masyarakat ikut terlibat dalam menetapkan prioritas sesuai dengan ketentuan pengawasan pembangunan yang dilaksanakan di Kampung Dempar.
2. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kampung langsung dan tidak langsung yang dilakukan secara tertulis melalui forum rapat yang dihadiri BPK, Petinggi dan masyarakat. dilakukan Badan Permusyaratan Kampung (BPK) tidak lepas dari peran serta masyarakat sehingga setiap kegiatan pengawasan yang dilakukan Badan Permusyaratan Kampung (BPK), masyarakat mengetahuinya, sebuah mekanisme kontrol diperlukan agar pemerintah yang demokrasi dapat terselenggara dengan baik dan terbuka. BPK dalam hal ini merujuk pada penyesuaian proses pengawasan yang dilakukan BPK dengan kehendak dan harapan masyarakat.
3. Menyusun laporan pertanggungjawaban dilakukan oleh setiap pengurus BPK di Kampung Dempar sesuai dengan kegiatan-kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan setiap tahunnya baik pembangunan fisik maupun non fisik. Mekanisme penyusunan tersebut berdasarkan azas-azas transparansi dan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban kegiatan disampaikan oleh Ketua BPK kepada Pemerintah Kampung yang kemudian dilanjutkan oleh Petinggi

Kampung kepada Camat dan seterusnya melalui Camat dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat.

4. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPK dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung dempar kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Kampung dalam pembangunan dan adanya kepercayaan Pememerintah Kampung terhadap masyarakat yang diajak untuk bekerja sama dalam melakukan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung. Sedangkan faktor penghambat Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan Kampung Dempar. Masyarakat terkadang masih ada yang tidak ikut beserta dalam pertisipasinya seperti kegiatan gotong-royong karena aktivitas rutin yang dijalankannya sebagai masyarakat tani di Kampung Dempar serta kendala yang biasa dihadapi BPK Kampung Dempar adalah keterlambatan keluarnya dana dan sumber daya manusia di dalam organisasi BPK sendiri, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh BPK dan Petinggi Kampung di Kampung Dempar berjalan sangat lambat.

### ***Saran***

1. BPK diharapkan dapat lebih memahami dan mengetahui dari seluruh kebutuhan dari masyarakat dalam hal pembangunan agar tidak lagi perbedaan pendapat dalam proses menentukan pembangunan di kampung. Dalam pelaksanaan program pembangunan sarana dan prasarana selanjutnya pengurus BPK dan masyarakat diharapkan lebih ikut ambil bagian dan memiliki inovasi-inovasi baru dalam menyusun program-program prioritas sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri dan hasil dari program kegiatan yang dilakukan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kampung Dempar selanjutnya.
2. Pemerintah hendaknya memperhatikan perkembangan lembaga BPK melalui program pendidikan khusus atau melalui pelatihan-pelatihan khusus secara berkesinambungan bagi para anggota BPK agar lebih mengetahui akan fungsi dan peran sebagai legislator Kampung. Diperlukan sosialisasi yang lebih menyeluruh dan secara rutin kepada masyarakat mengenai keberadaan BPK serta tugas dan fungsi BPK di Kampung Dempar. Selain itu pendanaan untuk kegiatan operasional BPK perlu ditingkatkan untuk kesejahteraan BPK.
3. Masyarakat diharapkan agar dapat memberikan dukungan atau partisipasi kepada BPK dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasannya serta masyarakat harus sadar dengan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah kampung karena pembangunan semata-mata untuk masyarakat itu sendiri dan setiap kegiatan pengawasan oleh BPK di Kampung Dempar sebaiknya dilakukan melalui kerjasama dengan masyarakat maupun lembaga-

lembaga lain, baik yang ada di dalam Kampung Dempar maupun diluar Kampung Dempar.

**Daftar Pustaka**

- Amins, Achmad. (2012). Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah. Yogyakarta:LaksBang Pressindo.
- Makmur. (2011). Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nurcholis, Hanif. (2011). Pertumbuhan & Penyelenggaraan PemerintahanDesa. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rahcman Abdul Arifin, (2001) Indikator pengawasan, Bandung: CV Mandar maju.
- Sujamto. (2003). Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Waristiano, Tahir. (2007) Prospek Pembangunan Desa. Fokus Media, Bandung.

***Dokumen-dokumen:***

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.